

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



*Gambar 2. 1 Logo Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang menteri yang posisinya dijabat oleh Yasonna Laoly sejak 27 Oktober 2014. Departemen Hukum dan HAM beberapa kali berganti nama, yaitu: "Kementerian Kehakiman" pada tahun (1945-1999), "Kementerian Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009) hingga saat ini.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

2.1.1 Profil Singkat Unit Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemenkumham RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Setjen Kemenkumham RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K.

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Unit Pusat Sekretariat jenderal beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6, RT.16/RW.7, Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 (Gedung Sentra Mulia).

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
4. Arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.1.2 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

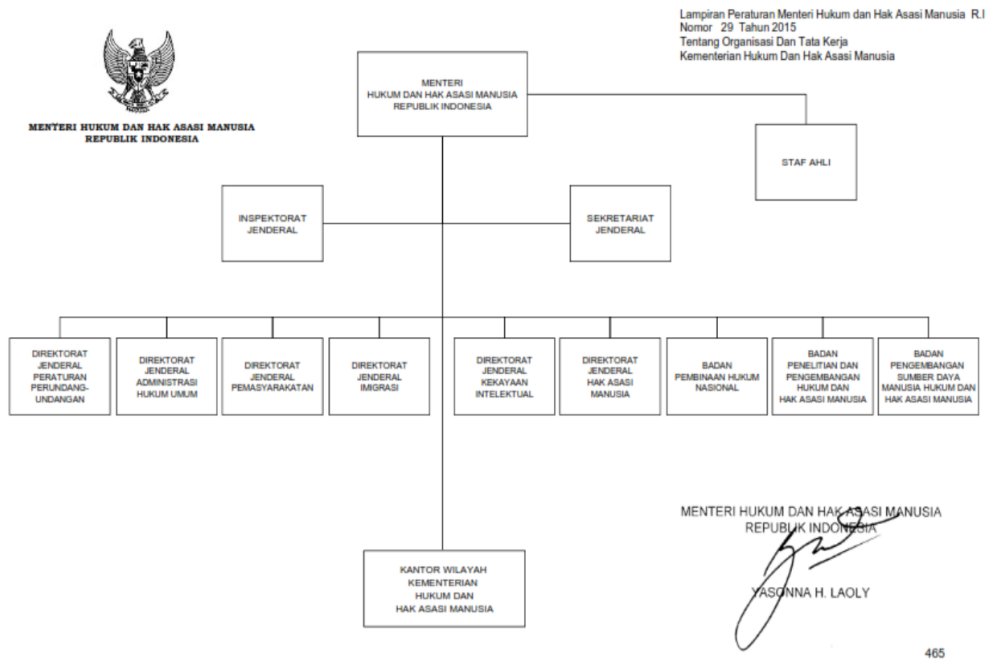
a. VISI

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

b. MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan berintegritas.

2.2 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Berikut merupakan kegiatan dari Sub Bagian Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI :

A. Peliputan dan penyajian berita

Bagian peliputan serta penyajian data memiliki tugas untuk mengambil liputan ketika Institusi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan acara dan divisi ini juga yang mengeluarkan output seperti gambar atau video yang layak untuk dipublikasikan.

B. Hubungan Masyarakat dan Media

Divisi ini bertugas dalam pengelolaan media media yang digunakan Institusi untuk mendistribusikan informasi yang ada. Kemudian melakukan acara seperti konferensi pers, maupun acara-acara penting dalam membangun institusi kepada pihak eksternal dan masyarakat.

C. Dokumentasi

Bertugas untuk menerima surat dan mencatat surat masuk serta keluar. Kemudian mendistribusikan surat sesuai dengan kepentingan, melakukan perawatan dan pemeliharaan arsip. Dengan mengumpulkan, kemudian menyusun dan mengelola dokumen.

